

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dalam upaya peningkatan PAD, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara baru melakukan upaya-upaya melalui upaya intensifikasi. Intensifikasi yang telah dilakukan melalui cara penyesuaian tarif, sistem pendataan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat/wajib pajak. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui menggali sumber penerimaan baru.
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah faktor kesadaran wajib pajak, faktor sumber daya manusia (SDM), dan faktor penegakan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus melakukan berbagai hal sebagai berikut:

1. Menjadikan kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak sebagai kegiatan rutin yang dapat dilakukan pemerintah daerah yang sifatnya berkelanjutan (*continue*). Dengan adanya kegiatan penyuluhan/sosialisasi yang bersifat rutin dan berkelanjutan tersebut, diharapkan dapat memberi dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat agar mau membayar pajak.
2. Untuk staf/pegawai pemungut pajak haruslah yang benar-benar berkompeten dan memahami tentang pendapatan daerah. Sehingga pemungutan dan penagihan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Perlunya penambahan sanksi, berupa sanksi pidana (kurungan). Sanksi ini ditujukan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh atau bagi wajib pajak yang melanggar sanksi Administrasi.